



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KUKAR
IDAMAN
TERBAIK



RENSTRA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2025-2029



Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, Jl. Wolter
Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 227/SK-BUP/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, serta untuk lebih efektifnya proses penyusunan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat Daerah mempunyai kemampuan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf yang disampaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor

- 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan: Telaahan Staf Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-11/PROGKEU/400.2/07/2025, tanggal 2 Juli 2025 tentang Permohonan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

1. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra;

3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

b. Ketua:

1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada penanggung jawab;
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;

c. Anggota:

1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas tahun lalu;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;
3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas;
5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas;
6. menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra masing-masing bidang;
7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas hasil telaahan, koreksi dan masing-masing bidang;
8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA:

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

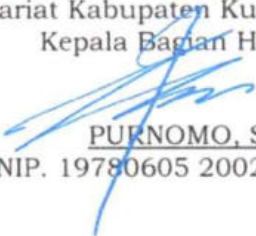
ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 227/SK-BUP/HK/2025, TANGGAL 11 AGUSTUS 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah:
 - 1. Bupati Kutai Kartanegara
 - 2. Sekretaris Daerah
- II. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. Ketua: Maslianti, SE.M.Si
NIP. 19740906 200012 2 003
(Perencana Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- IV. Anggota:
 - 1. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - 5. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Akhmad Sofyan Hamid, S.Sos, M.Si
NIP. 19690214 200012 1 004
(Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
7. Saipul Anwar S.Pd,M.Pd
NIP. 19690310 199103 1 016
(Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
8. Rina Hariyani, SE
NIP. 19711023 200112 2 002
(Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
9. Faridah, SKM,M.Adm.Kes
NIP. 19731221 199303 2 005
(Kepala UPT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
10. Lusen, S. Sos
NIP. 19800312 201001 1 019
(Kepala Tata Usaha UPT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
11. Anita Lusiana,S.Sos
NIP. 19710327 200701 2 015
(Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
12. Joni Saputra,S.Sos
NIP. 19780602 200701 1 008
(Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

13. Pipit Candra Dewi, S.I.P
NIP. 19790612 200701 2 033
(Pengolah Data dan Informasi, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
14. M. Arif Rahman Hakim, S.Sos
NI PPPK 19880502 202521 1 032
(Penata Layanan Operasional, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

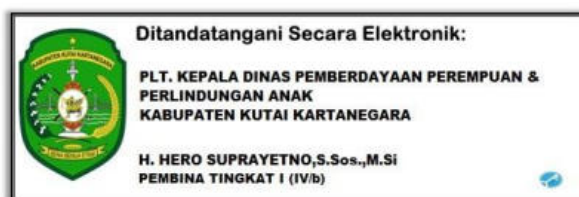
KATA PENGANTAR

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 serta RPJMD Tahun 2025–2029.

Dokumen ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta merupakan wujud implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025–2029.

Dokumen ini menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan sebagai tujuan, sasaran dan target pembangunan yang lebih terukur dan terstruktur dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta mendukung pemenuhan hak-hak anak dan pemberdayaan kelompok rentan, sehingga berkontribusi nyata dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah, yaitu Kutai Kartanegara Idaman Terbaik ***“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”***

Tenggarong, 22 Desember 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	12
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.3.1 Maksud.....	16
1.3.2 Tujuan.....	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	233
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	233
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana	255
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	300
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	499
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah.....	500

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	522
---	-----

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	522
---	-----

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	553
-----------------------------------	-----

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 67

3.1 Tujuan	67
3.2 Sasaran	68
3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan	71
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	80

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN 83

4.1 Uraian Program	83
4.2 Uraian Kegiatan	85
4.3 Uraian Subkegiatan	87
4.4 Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah	198
4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	208
4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	210
4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	211

BAB V PENUTUP 21312

LAMPIRAN 215

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Disabilitas	23
Tabel 2. 2 Jumlah dan Komposisi SDM Menurut Golongan DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara	24
Tabel 2. 3 Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berdasarkan tingkat Pendidikan	24
Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025	26
Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	31
Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	32
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	41
Tabel 2.8 Matriks akses-partisipasi-kontrol-manfaat (APKM)	72
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	52
Tabel 2.10 Matriks Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	56
Tabel 2.11 Matrik Kinerja Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.....	60

Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, 2025-2029	61
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	63
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	69
Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra DP3A Tahun 2025-2029	73
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	77
Tabel 3.4 Pemetaan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra DP3A	81
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	84
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	128
Tabel 4.3 Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah	128
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	199
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	201
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD	11
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan “Visi Indonesia Emas 2045” sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut, peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sangat penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun penyusunan Renstra ini merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah sejak dilantikannya dr. Aulia Rahman Basri sebagai Bupati dan H. Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya era kepemimpinan baru yang membawa visi dan misi pembangunan yang segar, sebagaimana ditekankan oleh Gubernur dalam sambutannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Visi kepemimpinan baru ini, yang berfokus pada potensi besar Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut adanya penyesuaian strategi dan program di setiap perangkat daerah.

Dengan dilantiknya bupati dan wakil bupati, maka disusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai instrumen untuk menterjemahkan visi dan misi kepemimpinan baru tersebut ke dalam program kerja konkret, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan kolaborasi demi pembangunan manusia berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Isu-isu kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi perempuan, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan sistem perlindungan anak dan penciptaan ruang yang aman dan ramah anak menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial masyarakat yang inklusif dan responsif gender.

Prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*/GEDSI) harus diterapkan sejak tahap perumusan kebijakan yakni dimulai dari penyusunan Renstra ini, pelaksanaan berbagai program, pengelolaan data gender dan anak, hingga evaluasi dan pelaporan. Penerapan ini mencakup upaya memperkuat kepemimpinan perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menyediakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang aman dan inklusif, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor kehidupan. Integrasi gender merupakan strategi untuk memasukkan perspektif kesetaraan gender ke dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek mempertimbangkan kebutuhan dan peran perempuan dan laki-laki secara adil, serta untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Ini termasuk memastikan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, serta

mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang disebabkan oleh norma sosial yang diskriminatif.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**. Kemudian sasaran Renstra DP3A yakni:

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dalam aktivitas Pembangunan,
2. Meningkatnya Perlindungan Anak dalam aktivitas Pembangunan.

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tersebut, dilakukan melalui langkah-langkah dan upaya yang dimuat dalam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

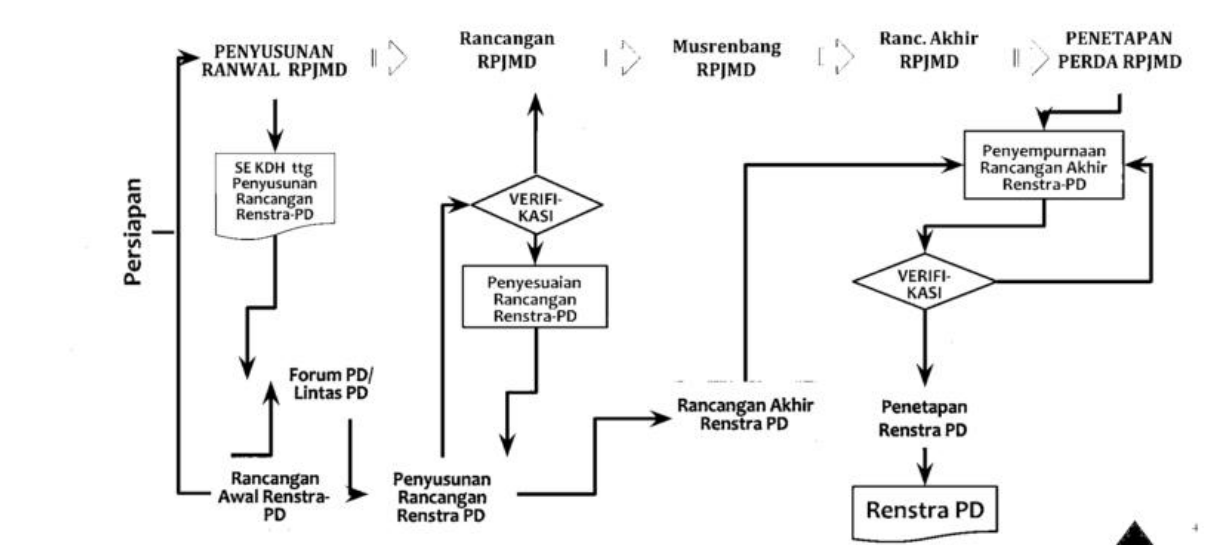
Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Keterkaitan antara penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD mencerminkan hubungan strategis dan teknis yang mendukung sinergi perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan arahan dari RPJMD. Proses penyusunan Renstra PD melibatkan koordinasi antara lintas perangkat daerah, forum perangkat daerah, dan evaluasi substansi melalui tahap verifikasi.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Prosedur ini melibatkan serangkaian tahapan yang terukur untuk memastikan kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan, terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD

Setelah Rancangan Akhir RPJMD disahkan menjadi Perda RPJMD, perangkat daerah melakukan penyempurnaan Renstra PD agar selaras dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. Penetapan Rancangan Akhir Renstra paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Penetapan ini dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar hukum dan legitimasi bagi pelaksanaan semua program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan penetapan ini, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara Idaman Terbaik “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 (Mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak (Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi anak dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tatacara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

15. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat;

24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 140);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 142);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 217 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak

Anak di Kutai Kartanegara; dan

33. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2336 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Forum Anak di Desa dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Renstra ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi:

- 1) Latar Belakang: pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya.
- 2) Dasar Hukum Penyusunan: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 3) Maksud dan Tujuan: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Sistematika Penulisan: Uraian garis besar isi dokumen.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini meliputi:

- 1) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a) Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b) Sumber daya Perangkat Daerah
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

- d) Kelompok sasaran layanan
- e) Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator dan target per tahun. Selanjutnya, dimuat juga strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu dimuat juga target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V: PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi.

DP3A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a) Kepala Dinas

Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris, bertugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan penganggaran, dan pengelolaan aset. Sekretariat terdiri atas:

- Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian: Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola internal.

c) Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Melaksanakan penguatan kelembagaan gender, pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor, serta pengelolaan dan penyajian data gender dan anak secara sistematis.

d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

Melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk pencegahan kekerasan, penguatan layanan pengaduan

dan rujukan, serta pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.

e) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

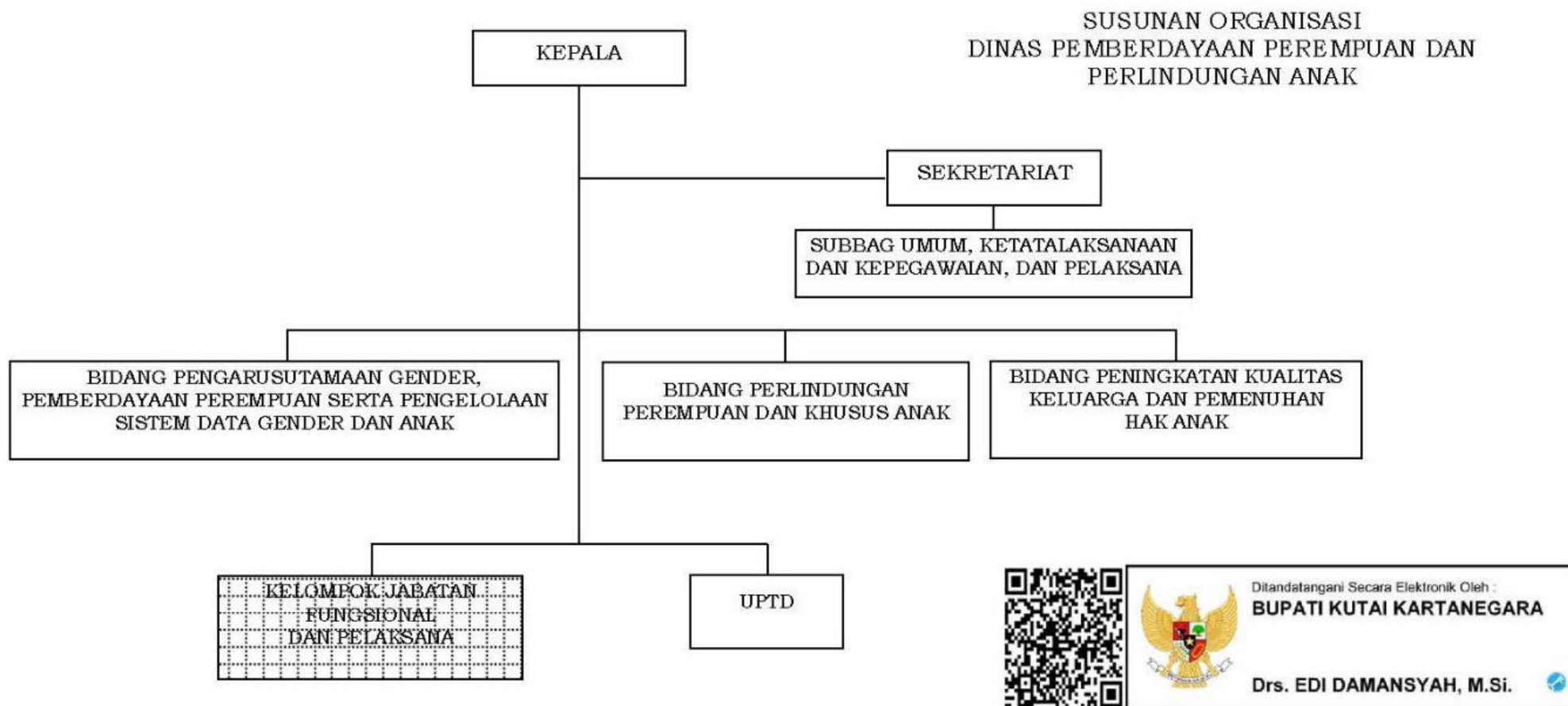
Melaksanakan program peningkatan kualitas keluarga, pelebagaan pemenuhan hak anak (PHA), serta penguatan kelembagaan penyedia layanan anak di tingkat kabupaten.

f) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Terdiri atas jabatan yang sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu yang mendukung tugas teknis dinas, serta jabatan pelaksana yang menangani tugas-tugas administratif dan operasional harian.

g) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketentuan pembentukan dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber daya yang dimiliki oleh DP3A mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Berikut adalah gambaran rinci mengenai sumber daya perangkat daerah yang dikelola oleh DP3A.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan terlatih di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah pegawai pada DP3A hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 43 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan dan kompetensi, terdapat variasi kualifikasi yang memerlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk mendukung pelayanan yang profesional dan adaptif. Sumber daya manusia ini terdiri dari berbagai kategori, yaitu:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Disabilitas

NO	USIA	L	P	DISABILITAS	JUMLAH	PERSENTASE
1	18-30	0	0	0	0	0
2	31-40	16	6	0	22	30.99
3	41-50	12	18	0	30	42.25
4	51-58	5	13	1	19	26.76
	JUMLAH	33	37	1	71	100

Sumber: Data Kepegawaian DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data jumlah pegawai yang berjumlah 71 orang, terdapat tiga kelompok usia yang menjadi bagian dari tenaga kerja di DP3A. Berdasarkan data jumlah pegawai sebanyak 71 orang, dapat diketahui bahwa kelompok usia 41–50 tahun merupakan yang paling dominan dengan jumlah 30 orang, atau sekitar 42.25% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada usia produktif awal, yang umumnya memiliki pengalaman kerja yang matang serta masih memiliki produktivitas tinggi.

Selanjutnya, kelompok usia 51–58 tahun menempati posisi kedua dengan jumlah 19 orang, atau sekitar 26.76% dari keseluruhan pegawai. Kelompok usia ini umumnya terdiri dari pegawai yang sudah berpengalaman dan memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan kepada pegawai yang lebih muda.

Sementara itu, kelompok usia 31–40 tahun merupakan kelompok dewasa dan produktif, yaitu 22 orang atau sekitar 30.99% dari total pegawai. Kelompok ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan dan regenerasi tenaga kerja. Secara keseluruhan, komposisi usia pegawai menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja berada pada rentang usia produktif dan berpengalaman, sehingga diharapkan dapat mendukung efektivitas serta kinerja DP3A secara optimal. Selain itu, dari keseluruhan pegawai yang ada, terdapat 1 orang pegawai penyandang disabilitas. Kehadiran pegawai disabilitas ini menunjukkan bahwa DP3A telah memberikan kesempatan kerja yang inklusif dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi semua individu tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, komposisi usia dan keberagaman pegawai ini mencerminkan struktur organisasi yang seimbang, berpengalaman, serta terbuka terhadap keberagaman dan inklusivitas di DP3A.

Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi SDM Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH	Persentase
1	GOLONGAN II	11	8	19	33.33
2	GOLONGAN III	16	14	30	52.63
3	GOLONGAN IV	3	5	8	14,04
	JUMLAH	30	27	57	100

Sumber: Data Kepegawaian DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat total 57 pegawai yang terbagi dalam tiga golongan. Golongan III mendominasi dengan jumlah 30 pegawai atau 52.63% dari total SDM, yang terdiri atas 16 laki-laki dan 14 perempuan. Golongan II berada di posisi kedua dengan jumlah 19 pegawai (33.33%), terdiri atas 11 laki-laki dan 8 perempuan. Sementara itu, Golongan IV memiliki jumlah pegawai paling sedikit, yaitu 8 orang (14,04%), terdiri atas 3 laki-laki dan 5 perempuan.

Tabel 2. 3 Distribusi DP3A Berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN		NON ASN		JUMLAH	Persentase
		L	P	L	P		
1	SMP SEDERAJAT	-	-	-	-	-	-
2	SMA SEDERAJAT	11	8	4	2	25	35.21

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN		NON ASN		JUMLAH	Persentase
		L	P	L	P		
3	D3	-	-	-	-	-	-
4	S1	16	14	-	7	37	52.11
5	S2	3	5	-	1	9	12.68
6	S3	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	30	27	4	10	71	100

Sumber: Data Kepegawaian DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Secara keseluruhan, DP3A memiliki 71 pegawai, yang terdiri dari 57 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 14 Non-ASN. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi, di mana tingkat pendidikan S1 (Sarjana) mendominasi dengan total 37 pegawai atau setara dengan 52.11% dari seluruh populasi. Tingkat pendidikan SMA Sederajat berada di posisi kedua dengan 25 pegawai (35.21%), diikuti oleh S2 (Magister) dengan 9 pegawai (12.68%). Tidak ditemukan pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah SMA (SMP Sederajat) atau di atas S2 (S3).

Dalam konteks komposisi kepegawaian, terlihat bahwa pegawai dengan status ASN mayoritas berpendidikan S1 (16 pria dan 14 wanita), sementara pegawai Non-ASN didominasi oleh lulusan S1 (7 pria dan 0 wanita). Secara gender, pada tingkat S1, jumlah pegawai wanita (16 ASN dan 7 Non-ASN) jauh melebihi pria (14 ASN dan 0 Non-ASN), menunjukkan peran signifikan wanita di tingkat sarjana. Secara total, komposisi pegawai ASN adalah 30 pria dan 27 wanita, sedangkan Non-ASN adalah 4 pria dan 7 wanita. Data ini menyoroti fokus kepegawaian pada lulusan sarjana dan menunjukkan adanya konsentrasi pegawai dengan pendidikan S1 dan SMA Sederajat.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen utama yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, operasional administrasi, dan kegiatan teknis lainnya.

**Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana DP3A Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2025**

No	Nama/Jenis Barang	Kondisi				Jumlah	
		Baik		Rusak			
1	A.C. Split	34	unit	-		34	unit
2	A.C. Window	5	unit	2	unit	7	unit
3	Alat Dapur lainnya	-		1	buah	1	buah
4	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-		6	buah	6	buah
5	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	buah	6	buah	7	buah
6	alat pengangkat lainnya (dst)	2	buah	-	buah	2	buah
7	Alat Penghancur Kertas	7	buah	2	buah	9	buah
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	29	buah	5	buah	34	buah
9	Alat Sidik Jari	-		11	buah	11	buah
10	Alat Studio Video Lainnya	4	buah	1	buah	5	buah
11	Bangku Tunggu	2	buah	-		2	buah
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	unit	-		2	unit
13	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	unit	-		1	unit
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	11	unit	-		11	unit
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit	-		1	unit
16	Bangunan Klinik/Puskesmas	1	unit	-		1	unit
17	Bangunan Tempat Kerja Lain- lain (dst)	1	unit	-		1	unit
18	Bangunan Tempat Parkir	1	unit	-		1	unit
19	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	buah	-		1	buah
20	Brandkas	2	buah	-		2	buah
21	Buffet Kaca	2	buah	-		2	buah
22	Camera Conference	2	buah	-		2	buah
23	Camera Digital	1	buah	-		1	buah
24	Camera Electronic	1	buah	1	buah	2	buah
25	Camera Video	-		1	buah	1	buah
26	CCTV - Camera Control Television System	4	buah	-		4	buah
27	Digital Video Effect	-		9	unit	9	unit
28	Dispenser	8	buah	1	buah	9	buah
29	External	-		7	buah	7	buah
30	Filing Cabinet Besi	9	buah	-	buah	9	buah

No	Nama/Jenis Barang	Kondisi				Jumlah	
		Baik		Rusak			
31	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	buah	-		2	buah
32	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	unit	-		1	unit
33	Gedung Pos Jaga Permanen	1	unit	-		1	unit
34	Gordyin/Kray	6	buah	-		6	buah
35	Handy Cam	-		2	buah	2	buah
36	Hard Disk	-		4	buah	4	buah
37	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	4	buah	-		4	buah
38	Jalan Khusus Lain-lain	1	buah	-		1	buah
39	Jam Mekanis	10	buah	-		10	buah
40	Jaringan Distribusi Lain-lain	3	unit	-		3	unit
41	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	2	unit	-		2	unit
42	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	unit	-		1	unit
43	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	1	unit	-		1	unit
44	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	unit	-		1	unit
45	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	3	unit	-		3	unit
46	Kipas Angin	14	buah	-		14	buah
47	Kompor Gas (Alat Dapur)	-		1	buah	1	buah
48	Kursi Besi/Metal	-		3	buah	3	buah
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	52	buah	12	buah	64	buah
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	buah	-	buah	3	buah
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	buah	-	buah	2	buah
52	Kursi Lipat	-		21	buah	21	buah
53	Kursi Putar	1	buah	-	buah	1	buah
54	Kursi Rapat	29	buah	-	buah	29	buah
55	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2	buah	-	buah	2	buah
56	Lambang Garuda Pancasila	1	buah	-	buah	1	buah
57	Lap Top	23	unit	12	unit	34	unit
58	Layar Film/Projector	2	unit	3	unit	5	unit
59	LCD Monitor	3	unit	-		3	unit
60	LCD Projector/Infocus	8	unit	-	unit	8	unit
61	Lemari Besi/Metal	2	buah	-	buah	2	buah
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	buah	-	buah	4	buah

No	Nama/Jenis Barang	Kondisi				Jumlah	
		Baik		Rusak			
63	Lemari Es	15	buah	1	buah	16	buah
64	Lemari Kaca	1	buah	-	buah	1	buah
65	Lemari Kayu	6	buah	17	buah	23	buah
66	Loudspeaker	2	buah	2	buah	4	buah
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35	buah	-		35	buah
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	buah	7	buah	10	buah
69	Meja Komputer	-		1	buah	1	buah
70	Meja Rapat	3	buah	-		3	buah
71	Mesin Absen (Time Recorder)			2	buah	2	buah
72	Mesin Fotocopy Lainnya	1	buah	-		1	buah
73	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-		2	buah	2	buah
74	Mesin Hitung Manual	1	buah	1	buah	2	buah
75	Mesin Ketik Listrik	-		3	buah	3	buah
76	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-		6	buah	6	buah
77	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	-		14	buah	14	buah
78	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	buah	5	buah	7	buah
79	Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	1	buah	-		1	buah
80	Mic Conference	1	buah	-		1	buah
81	Microphone/Wireless MIC	-		2	buah	2	buah
82	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	buah	-		1	buah
83	Mobil Ambulance	1	buah	-		1	buah
84	Modem	-		6	buah	6	buah
85	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	buah	-		2	buah
86	Note Book	5	buah	10	buah	15	buah
87	P.C Unit	48	unit	29	unit	77	unit
88	Pagar Permanen	1	buah	-		1	buah
89	Papan Nama Instansi	3	buah	-		3	buah
90	Peralatan Jaringan lainnya	2	buah	-		2	buah
91	peralatan studio audio lainnya (dst)	-		3	buah	3	buah
92	Pompa Air	1	buah	-		1	buah
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	buah	43	buah	97	buah

No	Nama/Jenis Barang	Kondisi				Jumlah	
		Baik		Rusak			
94	Rak Kayu	-		8	buah	8	buah
95	Rice Warmer	-		1	buah	1	buah
96	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	-		1	buah	1	buah
97	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	buah	-		2	buah
98	Scooter	3	buah	-		3	buah
99	Sepeda Motor	9	buah	10	buah	19	buah
100	Slide Projector	-		3	buah	3	buah
101	Slide Projector (Lapangan)	-		5	buah	5	buah
102	Sofa	3	buah	-		3	buah
103	Sound System	2	buah	-		2	buah
104	Stabilisator	-		5	buah	5	buah
105	Station Wagon	3	buah	2	buah	5	buah
106	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-		1	buah	1	buah
107	Tablet PC	-		2	buah	2	buah
108	Tabung Gas	-		1	buah	1	buah
109	Tanah Bangunan Gudang	1	unit			1	unit
110	Televisi	11	buah	5	buah	16	buah
111	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	-		1	buah	1	buah
112	Treng Air/Tandon Air	7	buah	-		7	buah
113	Tripod	1	buah	-		1	buah
114	Tripod Camera	2	buah	-		2	buah
115	Trolly Car/Lori	2	buah	-		2	buah
116	TV Monitor	2	buah	-		2	buah
117	Video Conference	1	buah	-		1	buah
118	Video Monitor	1	buah	-		1	buah
119	White Board	-		6	buah	6	buah
120	Wireless	-		1	buah	1	buah
121	Wireless Access Point	1	buah	-		1	buah
	Jumlah Total	555		310		865	

Sumber: KIB, DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai aset yang mendukung operasional dan pelayanan program di lapangan. Berdasarkan data barang inventaris asset menunjukkan bahwa terrrdapat 310 unit barang dalam kondisi rusak berat, sehingga memerlukan peremajaan

terhadap unit yang rusak serta dilakukan penghapusan asset agar tidak menjadi beban dinas.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta indikator program dan kegiatan selama periode Renstra 2021–2026. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak di daerah. Penilaian kinerja pelayanan mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

- a) Pencapaian target output dan outcome sesuai indikator yang ditetapkan;
- b) Kebermanfaatan layanan terhadap masyarakat, khususnya perempuan, anak, keluarga, serta kelompok rentan;
- c) Kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan peran perempuan, perlindungan korban kekerasan, pengembangan kelembagaan layanan, dan peningkatan kualitas hidup anak.

Secara umum, DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam berbagai indikator strategis, seperti penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan kapasitas dan perlindungan perempuan, serta pengembangan model layanan ramah anak. Layanan UPTD dan kemitraan lintas sektor juga berperan penting dalam menyediakan rujukan dan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, gambaran pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini. Tabel ini memuat informasi mengenai target indikator kinerja, capaian realisasi, dan rasio ketercapaiannya yang mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan, serta selanjutnya adalah Tabel 2.6 yang memuat tentang Rencana Anggaran beserta Realisasi Anggaran DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode Rencana Strategis sebelumnya.

**Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79,05	79,10	79,15	79,20	79,80	80,64	81,20	-	102,01	102,65	102,59	-
Persentase ARG dalam APBD	15,95	16,00	16,10	15,15	0,06	4,87	18,74	-	0,38	30,44	116,40	-
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,015	0,023	0,031	0,039	6,81	7,20	7,90	-	45,40	31,30	25,48	-

Sumber: Data yang diolah DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025.

**Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara**

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
I	INDIKATOR PROGRAM																
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,35	76,40	76,40	76,5	76,60	76,65	74,40	58,89			100,39	97,38	77,08		
2	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persen	15,95	16	16,10	15,15	15,2	0,06	4,87	18,74			0,38	30,44	116,40		
3	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	28,85	48,08	57,69	80,77	100,00	28,85	48,08	57,69			100	100	100		
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
5	Persentase anak memerlukan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	husus yang mendapatkan layanan komprehensif																
6	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	730	750	770	790	810	640	640	770			87,67	85,33	100		
7	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	11,11	27,78	50,00	77,78	100	11,11	16,67	33,33			100,00	60,00	66,67		
II	INDIKATOR KEGIATAN																
1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7			100,00	100,00	100,00		
2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	24	24	24	24	24	24	24	24			100,00	100,00	100,00		
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4			100,00	100,00	100,00		

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1			100,00	100,00	100,00		
5	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	7	7	7	7	7	7			100,00	100,00	100,00		
6	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6			100,00	100,00	100,00		
7	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12			100,00	100,00	100,00		
8	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	28	28	28	28	28	28	28	28			100,00	100,00	100,00		
9	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	Perangkat Daerah	20	25	40	30	40	20	25	40			100,00	100,00	100,00		
10	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota	Perempuan	200	160	180	150	190	200	160	180			100,00	100,00	100,00		

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	yang mendapatkan pelatihan																
11	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	-	80	60	80	50	0	80	60			#DIV/0!	100,00	100,00		
12	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3			100,00	100,00	100,00		
13	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kasus	50	50	50	50	50	25	32	43			50,00	64,00	86,00		
14	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	kasus	40	40	40	20	60	43	43	43			107,50	107,50	107,50		
15	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Lembaga	30	10	10	10	15	10	8	10			33,33	80,00	100,00		

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Layanan Perlindungan Perempuan																
16	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	Lembaga	20	30	20	20	25	20	30	20			100,00	100,00	100,00		
17	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	Korban	100	90	105	110	110	82	159	154			82,00	176,67	146,67		
18	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Desa	30	25	25	25	20	30	25	25			100,00	100,00	100,00		
19	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	Lembaga	4	4	3	4	2	4	4	3			100,00	100,00	100,00		
20	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	Lembaga	5	5	5	6	7	5	5	5			100,00	100,00	100,00		
21	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Puspaga	1	3	2	0	1	1	3	2			100,00	100,00	100,00		

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
22	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kecamatan	5	2	4	2	5	5	2	4			100,00	100,00	100,00		
23	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Penyedia layanan	-	-	-	4	-	-	-	-							

Sumber: hasil evaluasi Renja tahun 2022 sampai 2024

Evaluasi Renstra Periode 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.5 yang memuat Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Indikator Kinerja Utama dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Gender

Bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Pembangunan Gender mengalami peningkatan setiap tahun sesuai Indikator Pembangunan Gender, hal ini sesuai dengan nilai persentase setiap tahun sejak tahun 2022 sebesar 79,80% dan Tahun 2024 sebesar 81,20%.

b. Persentase ARG dalam APBD

Bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Anggaran Responsif Gender (ARG) mengalami peningkatan Fluktuatif setiap tahun disebabkan tidak semua Perangkat Daerah menyusun ARG berdasarkan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sesuai Pagu Indikatif masing-masing Perangkat Daerah, sehingga pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian secara significant sebesar 0,06%. Adapun untuk meningkatkan Capaian Kinerja lebih tinggi maka pada tahun 2024 telah dilakukan penguatan dan penambahan instrument penyusunan ARG berbasis IT, sehingga tercapai ARG melampaui target Renstra 2021-2026 sebesar 16,10% menjadi 18,74%.

c. Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten

Bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penanganan Layanan Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten telah dilayani secara Optimal dan Komprehensif, hal ini didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia Petugas Layanan, Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lainnya sesuai standar operasional, maka setiap kasus yang masuk

dalam proses pendaftaran laporan dapat dilayani, sehingga capaian target layanannya sebesar 100% setiap tahun.

- d. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan).

Bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penanganan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan), seluruh korban Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) yang ditangani Instansi terkait Kabupaten telah dilayani secara Optimal dan Komprehensif, hal ini didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia Petugas Layanan, Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lainnya sesuai standar operasional, maka setiap kasus yang masuk dalam proses pendaftaran laporan dapat dilayani, sehingga capaian target layanannya mengalami peningkatan setiap tahun, dari tahun 2022 sebesar 0,015% menjadi sebesar 7,90% pada tahun 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa capaian Program dan Kegiatan mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah mengalami kenaikan tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami penurunan karena adanya indikator standar tambahan dalam penilaiannya.
- 2) Capaian Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023 karena kurangnya pemahaman opd dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender.
- 3) Capaian Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten sesuai target yaitu 100 persen.
- 4) Capaian nilai kabupaten layak anak masih mengalami penurunan karena penilaian terhadap 5 klaster KLA masih rendah, hal ini disebabkan oleh keterlibatan opd belum optimal dalam memenuhi standar dan persyaratan KLA.

- 5) Capaian Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak belum maksimal karena hanya ada 1 Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di DP3A dan untuk pembentukan di kecamatan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Untuk penjelasan capaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Capaian kegiatan Sekretariat sudah memenuhi target sebesar 100 persen.
- 3) Capaian kegiatan pada bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak sudah memenuhi target yaitu 100 persen,
- 4) Capaian kegiatan pada bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak sesuai target 100 persen
- 5) Capaian kegiatan pada bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak ini mengalami fluktuatif karena pelayanan yang dilakukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak semakin meningkat sehingga dari tahun ke tahun melebihi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan sudah semakin tingginya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di keluarganya maupun dilingkungannya, sehingga semakin tahun semakin meningkat kasus kekerasan Perempuan dan anak yang ditangani oleh UPT PPA.

Selain capaian kinerja, pada bagian ini juga disajikan capaian anggaran selama beberapa tahun terakhir. Adapun tabel yang memuat capaian anggaran DP3A dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2					3					4					5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.080.293.850	13.473.297.958	13.622.220.063	-	-	7.851.914.700	12.249.400.032	11.892.156.653	-	-	86,47	90,92	87,30	-	-		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.145.000	350.000.000	700.000.000	-	-	149.817.478	329.445.626	599.367.323	-	-	98,47	94,13	85,62	-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.021.873.298	6.362.353.448	8.306.343.256	-	-	5.942.551.110	5.624.833.844	6.828.185.835	-	-	84,63	88,41	82,20	-	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.845.916	100.000.000	150.000.000	-	-	55.503.916	77.490.000	108.826.306	-	-	99,39	77,49	72,55	-	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.760.000	605.500.000	567.500.000	-	-	58.432.500	556.328.760	553.701.598	-	-	96,17	91,88	97,57	-	-		
Administrasi Umum	313.500.000	947.150.000	1.380.600.000	-	-	307.315.407	937.582.226	1.346.735.324	-	-	98,03	98,99	97,55	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2					3					4					5	
Perangkat Daerah																	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.817.000	3.817.000.000	602.324.000	-	-	491.666.131	3.610.828.399	580.006.000	-	-	97,98	94,60	96,29	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.388.636	691.294.510	1.155.452.807	-	-	484.293.700	577.688.267	1.140.464.067	-	-	86,27	83,57	98,70	-	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.964.000	600.000.000	760.000.000	-	-	362.334.458	535.202.910	734.870.200	-	-	87,74	89,20	96,69	-	-		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	300.000.000	1.074.100.000	1.769.431.000	-	-	285.577.513	845.204.612	1.440.437.056	-	-	95,19	78,69	81,41	-	-		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	210.000.000	355.074.000	-	-	-	98.767.000	204.549.164	-	-	0,00	47,03	57,61	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angga ran	Real isasi
1	2					3					4					5	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	654.504.000	1.149.357.000	-	-	66.521.585	547.324.122	1.073.999.100	-	-	88,70	83,62	93,44	-	-		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	209.596.000	265.000.000	-	-	219.055.928	199.113.490	161.888.792	-	-	97,36	95,00	61,09	-	-		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	540.000.000	789.700.000	1.315.700.000	-	-	422.451.509	631.727.227	1.059.752.324	-	-	78,23	80,00	80,55	-	-		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	139.700.000	286.200.000	-	-	125.082.000	58.549.893	171.932.340	-	-	83,39	41,91	60,07	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angga ran	Real isasi
1	2					3					4					5	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	400.000.000	635.480.000	-	-	177.914.435	370.600.054	616.430.037	-	-	79,07	92,65	97,00	-	-		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000	250.000.000	394.020.000	-	-	119.455.074	202.577.280	271.389.947	-	-	72,40	81,03	68,88	-	-		
PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	725.000.000	4.672.780.083	9.060.321.884	-	-	706.017.463	3.178.406.278	8.446.174.632	-	-	97,38	68,02	93,22	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angga ran	Realisasi
1	2					3					4					5	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	725.000.000	2.282.780.083	425.000.000	-	-	706.017.463	2.037.507.896	400.671.960	-	-	97,38	89,26	94,28	-	-		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.390.000.000	4.335.321.884	-	-	-	1.136.068.382	3.856.888.662	-	-	0,00	81,73	88,96	-	-		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000	4.300.000.000	-	-	-	4.830.000	4.188.614.010	-	-	0,00	0,48	97,41	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	330.718.362	330.718.362	250.000.000	-	-	323.635.814	318.423.661	230.582.968	-	-	97,86	96,28	92,23	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angga ran	Realisasi
1	2					3					4					5	
GENDER DAN ANAK																	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	330.718.362	330.718.362	250.000.000	-	-	323.635.814	318.423.661	230.582.968	-	-	97,86	96,28	92,23	-	-		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	495.000.000	865.000.000	1.130.000.000	-	-	414.361.050	739.557.871	996.002.742	-	-	83,71	85,50	88,14	-	-		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	600.000.000	-	-	298.880.050	279.681.500	524.442.400	-	-	85,39	79,91	87,41	-	-		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	145.000.000	515.000.000	530.000.000	-	-	115.481.000	459.876.371	471.560.342	-	-	79,64	89,30	88,97	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angga ran	Realisasi
1	2					3					4					5	
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100.000.000	315.000.000	1.327.816.000	-	-	95.472.090	272.229.900	1.162.455.849	-	-	95,47	86,42	87,55	-	-		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	150.000.000	650.000.000	-	-	-	123.510.900	560.421.500	-	-		82,34	86,22	-	-		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	100.000.000	165.000.000	577.816.000	-	-	95.472.090	148.719.000	529.954.226	-	-	95,47	90,13	91,72	-	-		

URAIAN	Target					Realisasi										Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angga ran	Real isasi
1	2					3					4					5	
Daerah Kabupaten/Kota																	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000	-	-	-	-	72.080.123	-	-	0,0 0	0,0 0	72, 08	-	-		
	11.571.012.2 12	21.520.596. 403	28.475.488.9 47	-	-	10.099.430.1 39	18.234.949.581	25.227.562.22 4	-	-	87, 28	84, 73	88, 59	-	-		

Sumber: Data yang diolah, Tahun 2025

Pada Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran yang tersedia semakin tahun semakin meningkat yaitu anggaran tahun 2023 meningkat sebesar 46.23 persen dari tahun 2022 dan anggaran tahun 2024 meningkat sebesar 24,42 persen dari tahun 2023. Realisasi belanja operasi pada tahun 2022 meningkat sebesar 2,55 persen dari realisasi belanja tahun 2023, hal ini disebabkan:

- 1) Porsi anggaran kas 20, 30, 20, 30 pada triwulan 1 (stu) cukup menyulitkan dinas sehingga pembiayaan terfokus pada pembayaran gaji, tunjangan dan oprasional kantor;
- 2) APBD Perubahan yang besar menyulitkan opd merealisasikan anggaran dalam waktu yang relative singkat;
- 3) Kurangnya koordinasi terhadap pengadaan barang jas sehingga berdampak pada realisassi paket pekerjaan;
- 4) Pada triwulan terakhir semua opd melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A kurang maksimal karena masing-masing berjalan dengan kegiatannya.

Pada tahun 2024 realisasi belanja operasi meningkat sebesar 8,77 persen dari tahun 2023, hal ini disebabkan DP3A intens berkoordinasi dengan OPD lain sehingga terjadi harmonisasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kelompok sasaran layanan. Penetapan kelompok sasaran ini mencerminkan komitmen DP3A dalam mendorong kesetaraan, keadilan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi bagi kelompok rentan dan marjinal.

Adapun kelompok sasaran layanan adalah:

- Perempuan di segala sektor, termasuk perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, dan perempuan rentan lainnya, yang memerlukan peningkatan kapasitas, perlindungan hukum, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.
- Anak-anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seperti anak yang menjadi korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, anak jalanan, dan anak berhadapan dengan hukum.
- Keluarga, sebagai unit strategis dalam mewujudkan ketahanan keluarga, pengasuhan berbasis hak anak, dan penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak serta pendidikan karakter.
- Masyarakat umum, dalam rangka meningkatkan literasi gender, kesadaran akan hak perempuan dan anak, serta membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan perempuan.
- Lembaga penyedia layanan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menjadi mitra strategis dalam penyediaan layanan pengaduan, rehabilitasi, pemberdayaan, serta pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

DP3A tidak bekerja secara terpisah, melainkan secara sinergis dan kolaboratif dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait. Adapun instansi yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan layanan DP3A antara lain:

1. Dinas Kesehatan – dalam penyediaan layanan kesehatan fisik dan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemenuhan gizi anak dan kesehatan reproduksi.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – dalam pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, penguatan sekolah ramah anak, serta pengarusutamaan gender dalam pendidikan.
3. Dinas Sosial – dalam rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial bagi korban kekerasan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus.

4. Bappeda – dalam perencanaan pengarusutamaan gender (PUG), penganggaran responsif gender (ARG), dan integrasi program perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Selain itu, mitra kerja strategis lainnya mencakup:

1. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur – Konsultasi dan penanganan terkait permasalahan yang terdapat di kabupaten serta koordinasi terhadap tugas dan fungsi sesuai kewenangan di kabupaten.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (atau sebutan lainnya) kabupaten/kota sekitar – koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
3. Polri dan Kejaksaan – sebagai penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan hukum korban.
4. Lembaga layanan berbasis masyarakat (LBM), UPTD PPA, dan rumah aman – sebagai pelaksana layanan pendampingan psikososial, hukum, medis, dan perlindungan sementara.
5. Rumah Sakit provinsi dan kabupaten/kota lainnya – untuk pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.
6. Forum Anak Daerah – sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak yang berperan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha – dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan keterampilan hidup, serta promosi hak-hak anak.
8. Media massa – sebagai mitra strategis dalam kampanye publik, sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, serta advokasi kebijakan yang ramah gender dan anak.

Penetapan kelompok sasaran dan kemitraan ini menjadi kerangka kerja strategis dalam memastikan program-program DP3A menjangkau kelompok yang tepat, berbasis kebutuhan lapangan, serta memberikan dampak nyata

bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada berbagai permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas, yang memengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang tersedia harus dikelola secara optimal guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai program seperti fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), penguatan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta peningkatan koordinasi dengan UPTD PPA dan lembaga layanan. Namun demikian, sejumlah persoalan mendasar masih perlu mendapatkan perhatian khusus agar pembangunan yang responsif gender dan peduli anak dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan merata.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tugas pokok dan fungsi pelayanan, berikut ini disajikan identifikasi masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya partisipasi perempuan dalam	Norma sosial dan budaya patriarki yang masih dominan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi	pengambilan keputusan, serta masih tingginya angka perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang rentan secara sosial dan ekonomi	Terbatasnya infrastruktur dan akses pendidikan serta pelatihan berbasis gender
		Minimnya dukungan terhadap perempuan dalam sektor ekonomi produktif
		Kurangnya pelatihan kepemimpinan dan akses perempuan ke forum-forum pengambilan keputusan
		Rendahnya peran organisasi perempuan dan minimnya dukungan sosial terhadap PEKKA.
		Degradasi Lingkungan dan dampaknya pada Kelompok Rentan
	Belum optimalnya implementasi strategi PUG di seluruh perangkat daerah	Kurangnya komitmen dan partisipasi aktif perangkat daerah terhadap PUG
		Lemahnya monitoring dan evaluasi program-program responsif gender
		Minimnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis gender
		Minimnya sinergi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program PUG
Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Minimnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pengasuhan,	Kurangnya sosialisasi dan pelibatan aparat desa dan kecamatan dalam upaya pencegahan kekerasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pendidikan seks usia dini, dan hak perempuan dan anak	Terbatasnya ketersediaan layanan perlindungan yang komprehensif dan berkualitas
		Keterbatasan SDM terlatih di UPTD PPA seperti psikolog, pekerja sosial, konselor, dan mediator
		Fasilitas rumah aman dan layanan korban yang belum memenuhi standar
		Belum optimalnya keberadaan dan penguatan PPATBM dan Satgas TPPO
		Belum tersedianya regulasi teknis daerah secara menyeluruh mengenai perlindungan perempuan dan anak
Rendahnya kualitas hidup keluarga dan belum optimalnya pemenuhan hak anak	Keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga	Kurangnya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan fasilitas ramah anak
	Masih tingginya angka kekerasan dan eksploitasi anak	Lemahnya regulasi dan sistem pengawasan terhadap pemenuhan hak anak
		Masih terdapat anak yang bekerja
		Masih cukup tingginya perkawinan usia anak
		Rendahnya kesadaran kolektif tentang pentingnya melibatkan anak dalam musrenbang atau forum lainnya.

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada kondisi aktual yang memengaruhi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam jangka waktu ke depan. Apabila tidak diantisipasi, isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pembangunan daerah, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Dalam menentukan isi strategis perangkat daerah maka perlu dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi perencanaan. Adapun telaahan dokumen tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029, Program pembangunan yang mendukung pencapaian target nasional, misalnya penguatan institusi keluarga, perlindungan anak dari kekerasan, peningkatan kualitas pemuda, pemberdayaan perempuan, dan pelayanan untuk penyandang disabilitas serta lansia. Program-program ini harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur, sesuai target tahunan yang sudah ditetapkan pada tingkat nasional.

Strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial). Strategi ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama

bagi perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi aktif, serta mendapat manfaat pembangunan secara berkeadilan. Analisis situasi ketimpangan gender, identifikasi akar masalah, dan penyusunan rencana aksi merupakan proses penting yang harus dimuat dalam Renstra guna memastikan program dan kegiatan OPD responsif gender dan inklusif.

Sasaran utama prioritas nasional, yaitu terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Hal ini menuntut setiap OPD untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berbasis kesetaraan gender dan inklusi sosial ke dalam program-program daerah. Target-target indikator utama, seperti Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK), Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang telah ditetapkan secara nasional dengan koordinasi dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program OPD hendaknya mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial secara menyeluruh di bidang pembangunan. Dengan demikian, kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan mampu menciptakan masyarakat yang adil, setara, serta berdaya saing tinggi. Prinsip pelaksanaan Renstra berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar dan arah utama reformasi birokrasi dan pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.10 Matriks Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 04.17 - Indeks	Indeks	65,58 (2023)	67,57	72,91

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Pemenuhan Hak Anak				
PP 04.17 - Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	79,91 (2023)	81,44	86,44
PP 04.17 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	Persen	Laki-laki: 31,11 Perempuan: 36,31	Laki-laki: 25,37 Perempuan: 31,6	Laki-laki: 22,82 Perempuan: 29,73
PP 04.17 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	Persen	2,37	2,41	2,70
PP 04.19 - Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan	Persen	6,6	6,3	4,9
PP 04.19 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	Lembaga	KL: 3; Provinsi: 2; Kab/Kota: 3	KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5	KL: 16; Provinsi: 15; Kab/Kota: 47
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	Persen	20,50	19,76	16,79
Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	Persen	9,02	8,82	8,64

Sumber: Rancangan Renstra KemenPPA 2025-2029

2) Telahaan Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur

Kesejahteraan perempuan dan anak di Kalimantan Timur menghadapi tantangan multidimensi. Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 83 jiwa (2023), didominasi komplikasi kehamilan dan persalinan, sementara prevalensi stunting (22,9%) masih di atas standar WHO meski mengalami penurunan. Kasus tuberkulosis pada anak usia 0–14 tahun melonjak menjadi 2.681 kasus (2023), dipicu rendahnya deteksi dini dan stigma sosial. Di bidang pendidikan, 56.613 anak tidak bersekolah (2025)—termasuk 30.221 anak belum pernah mengenyam pendidikan (terbanyak di Kutim dan Kukar) dan 13.583 anak putus sekolah, terutama di jenjang SMA/SMK. Keterbatasan akses ekonomi perempuan (proporsi UMKM dipimpin perempuan <30%) serta kekerasan berbasis gender memperparah kerentanan kelompok ini.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu transformasi demografi signifikan. Jumlah penduduk diproyeksikan melonjak dari 4,05 juta (2024) menjadi 5,04 Juta (2029) dengan laju pertumbuhan 3,58%, terkonsentrasi di Penajam Paser Utara (PPU) yang tumbuh 11,38%. Ledakan penduduk ini berpotensi memperlebar ketimpangan: kepadatan penduduk di Samarinda (1.407 jiwa/km²) berbanding ekstrem dengan Mahakam Ulu (2 jiwa/km²). Meski cakupan JKN mencapai 107,03% (2024), akses layanan kesehatan reproduksi dan KB masih terbatas di daerah rural. Bonus demografi (rasio ketergantungan turun ke 39,35% pada 2029) menjadi peluang strategis jika didukung peningkatan kualitas SDM.

Isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Isu ini sangat relevan dengan potensi demografis daerah, mengingat proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur kependudukan di Kalimantan Timur, menjadi modal dasar pembangunan yang kuat. Kekuatan modal SDM ini dipertegas oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur yang tertinggi di Pulau Kalimantan, serta semakin berkembangnya komunitas wirausaha muda di kota-kota besar seperti Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan. Meskipun demikian, di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, tantangan yang masih dihadapi adalah belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut, menunjukkan bahwa potensi SDM yang kuat ini belum sepenuhnya terdistribusi dan terdayagunakan secara optimal di seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memanfaatkan momentum bonus demografi dan pembangunan IKN, Kalimantan Timur berpeluang menjadikan isu perempuan, anak, dan kependudukan sebagai pilar transformasi. Integrasi program perlindungan anak, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, serta pengelolaan migrasi terencana akan mendorong terciptanya generasi emas yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi "Kaltim Sejahtera 2045".

**Tabel 2.11 Kinerja Dinas Kependudukan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi
Kalimantan Timur**

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak				
Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	28,67	29	40
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100
Puspayang berprespektif gender dan anak sesuai standar	Lembaga	9	10	16
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	99	100	100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Absolute	2,17	2,14	2,10
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility/ASFR 15-19</i>)	Absolute	18,2	17,78	17,61
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (<i>demand satisfied</i>)	%	77,37	78,29	80,75
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	21	20	18
Indeks Pembangunan Keluarga (IPEK)	Indeks	68,69	69,12	70,35
Persentase perkawinan keluarga remaja	%	90,57	91,04	92,34
Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,1	58,22	58,68

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Indeks	22,84	27,24	42,24
Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan (TKD)	%	14,03	3,54	12,07

Sumber: RPJMD Provinsi Kaltim 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara fundamental diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana pencapaiannya sangat bergantung pada keberhasilan tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Renstra DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai wilayah dengan potensi demografi besar dan tantangan spesifik, berfungsi sebagai instrumen vital yang memastikan isu-isu strategis seperti pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan akses SDM, dan perlindungan perempuan dan anak ditangani secara efektif. Berikut adalah tujuan dan sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indkes Ketimpangan Gender (IKG)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam bisa sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi	Persentase UMKM Perempuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 perempuan
		Rasio Kekerasan Terhadap anak per 100.000 anak
	Meningkatnya Pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil telaahan terhadap faktor internal maupun eksternal, dapat dirumuskan isu-isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain mempertimbangkan renstra kementerian dan renstra provinsi, perumusan isu dinas juga memperhatikan potensi, permasalahan, isu KLHS, dan dinamika isu di tingkat global, nasional, regional dan daerah.

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta masih tingginya angka perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang rentan secara sosial dan ekonomi	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDG 5: Gender Equality	RPJMN: Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Rendahnya IPG dan IDG Kalimantan Timur	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif	a. Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi b. Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Pengembangan UPTD PPA dan PPATBM di wilayah kabupaten	Belum optimalnya implementasi strategi PUG di seluruh perangkat daerah	Penanggulangan Kekerasan Seksual	Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	RAN PPA, RAN TPPO, dan RANHAM	-		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Penyediaan layanan perlindungan sosial berbasis masyarakat	Minimnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pengasuhan, pendidikan seks usia dini, dan hak perempuan dan anak		Agenda inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan global	Penguatan sistem perlindungan sosial nasional	Belum meratanya layanan sosial di wilayah desa dan terpencil	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi	
Fasilitasi keluarga tangguh dan ramah anak dalam pembangunan desa	Keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga		Perubahan iklim dan dampak sosial terhadap kelompok rentan	PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Tingginya kerentanan bencana banjir dan kebakaran lahan	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	-

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUKAR	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Forum Anak dan DRPPA	Masih tingginya angka kekerasan dan eksploitasi anak		Kampanye global untuk kesetaraan dan anti-kekerasan gender	Permendagri 67/2011 tentang PUG di daerah	Masih kuatnya budaya patriarkal dan relasi kuasa timpang	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural	-
Penguatan sistem kesiapsiagaan sosial berbasis komunitas			Transformasi sosial menuju masyarakat tangguh dan adaptif	Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Dampak relokasi IKN terhadap perubahan sosial dan beban kelompok rentan	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana	-

Sumber: hasil analisis, 2025

Tabel tersebut disusun sebagai hasil pemetaan antara potensi kewenangan daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Setiap baris mencerminkan proses analitis dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas yang relevan dan krusial untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis DP3A. Tabel ini menjadi alat bantu untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan dinamika eksternal dan agenda nasional yang berdampak langsung pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Isu-isu strategis yang disimpulkan seperti ketimpangan gender dalam akses dan partisipasi, dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan refleksi dari kompleksitas tantangan yang dihadapi. Isu-isu ini tidak hanya berasal dari konteks lokal, tetapi juga terpengaruh oleh perkembangan nasional dan global, seperti komitmen terhadap SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), konvensi internasional tentang hak anak dan perempuan, serta tren global mengenai respons gender dalam bencana.

Melalui tabel ini, DP3A dapat menentukan arah kebijakan dan prioritas program yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Pengelompokan isu berdasarkan sumber dan tingkatannya membantu merumuskan strategi intervensi yang terukur, serta memperkuat integrasi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Pendekatan ini mendukung prinsip perencanaan berbasis *No One Left Behind* (NOLB) yakni sebuah prinsip utama dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, harus memiliki akses yang sama terhadap peluang, perlindungan, dan dukungan, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan penyelesaian isu-isu strategis, dengan fokus pada mendukung visi dan misi pembangunan daerah, serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas DP3A.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 selaras dengan misi Presiden tahun 2025-2029 sebagaimana dimuat dalam Misi/Asta Cita ke-4 yang mencakup penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kesetaraan gender. Lebih lanjut, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berorientasi pada penyelesaian isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan diarahkan untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung pencapaian Misi RPJMD ke-1 yaitu: **Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial**. Misi ini dijabarkan ke Tujuan 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berkarakter.

Adapun tujuan DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 adalah: **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan**, dengan Indikator Tujuan: **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur, realistis, dan terarah guna mencapai hasil yang sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran Renstra DP3A adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dalam Aktivitas Pembangunan**, dengan indikator: **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
- 2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak dalam Aktivitas Pembangunan**, dengan indicator : **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara dalam seluruh aspek pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Melalui peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, diharapkan perempuan dapat berperan aktif sebagai subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, dan terlindungi hak-haknya

Tujuan dan Sasaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang efektif, terukur, dan berdampak pada peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran ini dirancang untuk mencapai hasil yang nyata melalui indikator kinerja utama yang terukur.

Rencana target pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	0,42	0,39	0,36	0,33	0,31	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81,5	82,1	82,8	83,2	84,25	85,1	
		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,5	62,9	63	63,05	63,1	63,2	

Tabel di atas menyajikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029. Perencanaan ini merujuk pada keterkaitan yang sistematis antara kebijakan nasional (NSPK), sasaran RPJMD, tujuan strategis, sasaran, indikator kinerja, hingga target tahunan yang dirancang secara bertahap dan terukur. Tujuan utama yang diangkat meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang.

Indikator yang digunakan adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk memantau kemajuan kesetaraan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebagai indikator kunci perlindungan anak. Seluruh indikator ini ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga mencapai kondisi ideal pada akhir periode Renstra tahun 2030.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut tidak lepas dari landasan regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Kerangka kebijakan ini memperkuat legitimasi dan arah pelaksanaan program DP3A dalam mewujudkan perlindungan serta pemberdayaan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang efektif, terarah, dan berdampak nyata. Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang disusun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga kemajuan dan capaian dapat dievaluasi secara berkala. Upaya ini diharapkan mampu menjawab tantangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak melalui layanan yang lebih optimal, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tujuan ini akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya strategi mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar efektif dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan daerah.

Dalam penentuan strategi DP3A, dilakukan analisis menggunakan pendekatan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender dan kerentanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya dengan teridentifikasinya ketimpangan gender dan kerentanan maka dapat dipilih beberapa rencana tindak lanjut/strategi responsif gender yang perlu dilakukan. Adapun matriks tersebut dimuat sebagai berikut:

Tabel 2.8 Matriks Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM)

Aspek	Laki-laki	Perempuan	Kelompok Rentan (Anak, Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat, dll)	Analisis Ketimpangan Gender & Kerentanan	Rencana Tindak Lanjut / Strategi Responsif Gender
Akses (kesempatan memperoleh sumber daya, informasi, pelatihan, fasilitas)	Umumnya lebih mudah mengakses pelatihan dan sumber daya ekonomi (karena mobilitas dan waktu lebih fleksibel).	Terbatas karena beban domestik dan waktu, kurang informasi dan dukungan transportasi.	Akses sangat terbatas, tergantung pendamping keluarga atau lembaga sosial.	Ada ketimpangan signifikan dalam akses informasi, modal, dan kesempatan belajar.	Menyediakan fasilitas penitipan anak, transportasi aman, sosialisasi di jam fleksibel, dan materi disabilitas- <i>friendly</i> .
Partisipasi (keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan)	Lebih dominan dalam forum dan rapat publik.	Partisipasi rendah karena norma sosial, waktu terbatas, dan kurang percaya diri.	Sangat rendah; sering tidak dilibatkan dalam forum.	Struktur sosial dan budaya masih patriarkal.	Bentuk kelompok kerja perempuan dan rentan, fasilitasi pelatihan kepemimpinan dan advokasi.
Kontrol (kekuasaan dalam mengatur atau memutuskan penggunaan sumber daya dan hasil)	Menguasai aset produktif (tanah, modal, keputusan keluarga).	Aset dan keputusan biasanya dikuasai laki-laki, perempuan hanya “pengguna”.	Tidak memiliki kontrol; tergantung wali atau pengasuh.	Ketimpangan kontrol atas sumber daya dan keputusan.	Integrasikan pendekatan keluarga setara (joint decision-making), advokasi kebijakan aset perempuan.
Manfaat (hasil yang diperoleh dari)	Mendapat manfaat ekonomi dan	Manfaat dirasakan secara tidak langsung	Manfaat minim, sering tidak disesuaikan	Kesenjangan manfaat antar	Monitoring manfaat berdasarkan gender dan

Aspek	Laki-laki	Perempuan	Kelompok Rentan (Anak, Disabilitas, Lansia, Masyarakat Adat, dll)	Analisis Ketimpangan Gender & Kerentanan	Rencana Tindak Lanjut / Strategi Responsif Gender
program/kegiatan)	sosial lebih besar.	(misalnya peningkatan kesejahteraan keluarga, bukan pribadi).	dengan kebutuhan spesifik.	kelompok masih tinggi.	kerentanan; libatkan kelompok rentan dalam evaluasi.

Sumber: hasil analisis, 2025

Strategi dalam mencapai sasaran Renstra DP3A dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra DP3A Tahun 2025-2029

Bidang	Strategi	Uraian
Pemberdayaan Perempuan	Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	– Memperkuat kelembagaan PUG dalam melaksanakan kebijakan dan program yang responsif gender – Mengintegrasikan analisis gender dalam kebijakan daerah – Memperkuat PUG di seluruh perangkat daerah – Membentuk kelompok kerja perempuan dan rentan – Fasilitasi pelatihan kepemimpinan dan advokasi
	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data dan informasi gender dan anak	– Menyediakan data terpilah gender dan anak yang akurat dan mudah diakses – Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis bukti dan pemerataan manfaat.

Bidang	Strategi	Uraian
Peningkatan Partisipasi Politik dan kepemimpinan Perempuan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	– Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. – Melakukan peningkatan kapasitas perempuan untuk pengambilan keputusan – Mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan, fasilitasi usaha, dan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
Perlindungan Perempuan & Anak	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi	– Mengembangkan sistem layanan pengaduan dan rujukan terpadu yang aman dan ramah bagi penyintas kekerasan – Memperkuat UPTD PPA untuk layanan rujukan terpadu untuk menangani kasus kekerasan secara profesional dan sensitif gender. – Mengembangkan program perlindungan anak berbasis komunitas – Menyediakan ruang aman, SOP layanan, dan pendampingan inklusif – Menyediakan fasilitas penitipan anak dan transportasi aman – Melaksanakan sosialisasi di jam fleksibel, dan materi disabilitas-<i>friendly</i>.
Peningkatan Kesejahteraan Anak & Kelompok Rentan	Peningkatan cakupan dan kualitas pemenuhan hak anak	– Melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis keluarga dan komunitas.

Bidang	Strategi	Uraian
		– Meningkatkan akses layanan anak disabilitas terhadap pendidikan dan perlindungan. – Mengembangkan program sekolah, lingkungan, dan desa ramah anak
Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga	– Mengembangkan pelatihan pengasuhan untuk keluarga terutama keluarga rentan – Meningkatkan ekonomi keluarga rentan antara lain melalui fasilitasi kegiatan wirausaha perempuan, akses pembiayaan, dan pengembangan kelompok ekonomi produktif. – Penguatan kapasitas keluarga melalui pendidikan pengasuhan positif, peningkatan literasi gizi, pendidikan kesehatan reproduksi, dan manajemen konflik keluarga. – Pemenuhan hak perempuan dan anak dalam keluarga antara lain dengan peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan layanan bantuan hukum. – Mengintegrasikan pendekatan keluarga setara (joint decision-making)

Sumber: hasil analisis 2025

Melalui pendekatan yang terukur dan berbasis indikator kinerja, DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk menciptakan transformasi nyata dalam layanan publik, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Konsistensi dalam pencapaian target tahunan serta pemutakhiran

indikator secara berkala menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini hingga tahun 2030.

Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan dilaksanakan melalui pentahapan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara menyeluruh. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Kelembagaan PUG dan PHA	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Pengembangan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan, Serta Penguatan Perlindungan Anak	Pemantapan Kemandirian Perempuan dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Perwujudan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak (PUGP3SDGA)	Penguatan Kelembagaan PUG dan Advokasi Fasilitas Publik yang Responsif Gender	Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan PUG dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Kemandirian Perempuan dalam berbagai Bidang Pembangunan	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak (PK2PHA)	Penguatan Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Standarisasi Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Perwujudan Kelembagaan PHA yang Memperkuat Layanan Kepada Masyarakat dan Inovatif serta Transformatif pada	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak

Bidang	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Kelembagaan PUG dan PHA	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Pengembangan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan, Serta Penguatan Perlindungan Anak	Pemantapan Kemandirian Perempuan dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Perwujudan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
				Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	
Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak (P2KA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak secara Komprehensif	Optimalisasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Sumber: hasil analisis, 2025

Tabel di atas menggambarkan tahapan perencanaan strategis DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2026 hingga 2030. Penahapan ini disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan berkelanjutan yang menekankan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta integrasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam sistem pembangunan daerah. Setiap tahap dirancang untuk menjawab isu-isu prioritas seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan akses terhadap layanan perlindungan sosial, hingga ketimpangan gender dalam pembangunan.

Tahap I (2026) difokuskan pada penguatan kelembagaan PUG dan advokasi fasilitas publik yang responsif gender, penguatan kelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus Anak menjadi Penguatan Kelembagaan PUG dan PHA pada semua bidang.

Tahap II (2027) menitikberatkan pada peningkatan kebijakan penyelenggaraan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, kemudian pada standarisasi kelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Tahap III (2028) menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan dunia usaha serta pengembangan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak secara komprehensif.

Tahap IV (2029) diarahkan pada perwujudan pondasi Kemandirian Perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, perwujudan kelembagaan PHA yang memperkuat layanan kepada masyarakat dan inovatif serta transformatif pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

serta optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Tahap V (2030) berorientasi pada pemantapan menuju kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, terwujudnya pemenuhan hak anak serta terwujudnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Secara keseluruhan, penahapan ini menegaskan komitmen DP3A dalam membangun sistem perlindungan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika sosial. Strategi ini juga selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan menjadikan perempuan dan anak sebagai subjek utama pembangunan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan implementasi strategi sehingga dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional dan daerah. Penentuan arah kebijakan Renstra DP3A disusun selaras dengan arah kebijakan RPJMD pada Misi 1 (tabel 3.4 halaman 84 dan 86). Arah kebijakan Renstra DP3A untuk pembangunan sampai tahun 2030 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4 Pemetaan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra DP3A

NO	Operasionalisasi (NSPK)	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD	Ket.
1	Permen PPPA No. 2 Tahun 2013 (Advokasi & Edukasi PPRG)	Melaksanakan Advokasi, edukasi, komunikasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergitas kepada seluruh pemangku kepentingan/ stakeholder dalam penanganan kelompok rentan	Perlindungan sosial kelompok rentan	Terdapat dalam arah kebijakan RPJMD pada misi ke 1 (tabel 3.4 halaman 84 dan 86)
2	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	Meningkatkan akses perempuan di berbagai bidang pembangunan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, hukum)		
3	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Meningkatkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan		
4	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petugas layanan bagi penanganan kelompok rentan		
5	UU No. 23/2002 & Permen PPPA No. 1/2008 tentang PUHA	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bersama kualitas keluarga kelompok rentan		
6	Permen PPPA No. 8 Tahun 2024 tentang Kekerasan berbasis gender dalam bencana	Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana yang responsif terhadap kelompok rentan		
7	Permen PPPA No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	Meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan layanan terhadap kelompok rentan		
		Meningkatkan kerjasama antar lembaga penyedia layanan terhadap kelompok rentan		

NO	Operasionalisasi (NSPK)	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD	Ket.
8	Permen PPPA No. 1 Tahun 2008 (PUHA) & UU No. 23/2002	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia calon pengantin yang akan membangun keluarga baru berkualitas	Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia	Terdapat dalam arah kebijakan RPJMD pada misi ke 1 (tabel 3.4 halaman 84 dan 86
		Mengembangkan kegiatan kreatif dan inovatif masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga		
		Mengembangkan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak		
9	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyedia layanan pada keluarga dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak		
10	Permen PPPA No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak		
		Transformasi layanan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		
		Penguatan kerjasama lintas daerah pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di daerah kab/kota		

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, diperlukan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penjabaran tujuan dan sasaran DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara, dituangkan secara lebih operasional ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk periode lima tahun. Penyusunan program, kegiatan, dan pendanaan dilakukan dengan mengedepankan beberapa pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan kinerja, melalui penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) dan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar alokasi sumber daya secara efisien dan terukur;
3. Prioritas program berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4. Dukungan terhadap program prioritas bupati dan wakil bupati tahun 2025-2029.

4.1. Uraian Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program urusan dan program penunjang urusan. Program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah sedangkan program penunjang urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumah tangga dalam rangka menunjang tujuan dinas.

Dalam rangka menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan yang optimal, serta pemenuhan ha-hak anak dan administrasi pemerintahan daerah, dengan indikator yang jelas dan terukur, serta pendanaan yang direncanakan akan mendukung pelaksanaan program secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan harapan program ini mampu menjawab tantangan pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sinergi antara pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

Mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, DP3A menetapkan rencana program sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun

mendatang. Adapun rencana Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
4. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang memanfaatkan sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian program dan sasaran yang dirumuskan. Penyusunan kegiatan mempertimbangkan tingkat urgensi dan efektivitasnya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Adapun rencana Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (ARG)
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (ARG)
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (ARG)

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (ARG)
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (ARG)
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (ARG)
- II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG)
 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG)
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG)
- III. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG)
- IV. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (ARG)
 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG)
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG)
- V. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (ARG)

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG)

VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG)
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG)

VII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG)
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ARG)
3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ARG)

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan dalam rencana pembangunan jangka menengah DP3A tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 6 (enam).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 4 (empat).

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 8 (delapan).
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 4 (empat).
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
9. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 4 (empat).
10. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).
12. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).
13. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).
14. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).

16. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).
17. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
18. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 5 (lima).
19. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 4 (empat).
20. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
21. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).
22. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 (tiga).
23. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (ARG) dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 2 (dua).

Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil dari cascading kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mulai dari tujuan, sasaran, outcome sampai ke output. Tujuan, sasaran, outcome sampai ke output Renstra merupakan kinerja yang ingin dicapai atau dihasilkan. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mengukur kinerja program dan kegiatan serta sub

kegiatan diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, kelompok sasaran kegiatan harus dirumuskan secara spesifik dan rinci agar memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan menerima manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Tabel teknik menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan DP3A sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 35 Tahun	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	-	-	-	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindung an Anak							
Sasaran RPJMD: Meningkatn ya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	-	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dalam Aktivitas Pembangunan	-	-	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak dalam Aktivitas Pembangunan	-	-	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-
-	-	-	Meingkatkan Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	-	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-
-	-	-	-	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
-	-	-	-	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Meningkatnya pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-
-	-	-	-	Meningkatnya penataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-
-	-	-	-	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-
-	-	-	-	Meningkatnya pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
-	-	-	-	Meningkatnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-
-	-	-	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
-	-	-	-	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-
-	-	-	-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-
-	-	-	-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Tersedianya Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan /Material	-
-	-	-	-	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
-	-	-	-	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	-
-	-	-	-	Meningkatnya pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
-	-	-	-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
-	-	-	-	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-
-	-	-	-	Meningkatnya pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
-	-	-	-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
-	-	-	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	-	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Meningkatnya Penerapan ARG dalam Perencanaan dan Panganggaran Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Score ARG minimal 20 Persen	2.08.02.2.01 Pelebagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pangarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	terlaksananya pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	-	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Data Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	-
-	-	-	Menurunnya Kekerasan	-	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			terhadap Perempuan		yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		
-	-	-	-	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah pihak/lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
-	-	-	-	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dilayani secara Komprehensif	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi		Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
-	-	-	-	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Kabupaten/Kota			
-	-	-	-	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan	2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan yang mendapatkan bimtek	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
-	-	-	-	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	-	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-
-	-	-	-	Meningkatnya Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah SDM PPA yang meningkat Kapasitasnya dalam Memberikan Pelayanan Pengaduan Korban Kekerasan	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-
-	-	-	-	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilayani secara Komprehensif	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
-	-	-	-	Meningkatnya Penguatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	-
-	-	-	-	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			
-	-	-	-	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kota	-
-	-	-	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	-	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-
-	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang Ramah Anak	Jumlah Lembaga Ramah Anak	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kewenangan Kabupaten/Kota	
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0004 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
-	-	-	-	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung	-	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA Sesuai Standar	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak				
-	-	-	-	Meningkatnya Kapasitas Pusat Pembelajaran Keluarga	Jumlah Puspaga yang dibina	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
-	-	-	-	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya kapasitas Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dalam Daerah Kabupaten/Kota	
-	-	-	-	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-
-	-	-	-	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	Terlaksananya layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meingkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	58,89	70,7 6	7.830.17 9.999	71	10.944.3 73.547	71,5	12.247.2 44.764	71,8	12.475.0 08.551	72	14.786.0 31.650	73	16.093.5 98.851	Sekretaris

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	9	10	485.593. 100	9	550.000. 000	10	900.000. 000	10	1.100.00 0.000	10	1.400.00 0.000	10	1.450.00 0.000	Sekretaris
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6	3	235.236.1 00	3	150.000.0 00	3	250.000.0 00	4	350.000.0 00	4	450.000.0 00	4	450.000.0 00	Sekretaris
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3	1	25.200.00 0	1	50.000.00 0	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	4	200.000.0 00	5	250.000.0 00	Sekretaris

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	1	65.050.00 0	1	100.000.0 00	1	150.000.0 00	1	150.000.0 00	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	Sekretaris
Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	24.629.80 0	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	Sekretaris
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup	-	1	108.971.2 00	1	150.000.0 00	1	150.000.0 00	2	250.000.0 00	2	250.000.0 00	2	250.000.0 00	Sekretaris

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perangkat Daerah (data)														
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (berita acara)	-	1	26.506.00 0	-	-	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	Sekretaris
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Meningkatnya pengadministrasian Keuangan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	4	6.277.00 0.746	4	6.908.36 4.933	4	6.845.20 8.764	4	7.242.97 2.551	4	7.638.99 5.650	4	8.850.56 2.851	Sekretaris

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perangkat Daerah	yang akuntabel (Laporan)														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	48	40	6.134.504.746	60	6.717.168.933	60	6.561.465.433	60	6.922.972.551	60	7.168.995.650	60	8.350.562.851	Sekretaris
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	-	1	13.440.000	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	Sekretaris
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2	116.196.000	2	116.196.000	2	129.743.331	2	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	Sekretaris

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (laporan)														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	1	12.860.00 0	1	25.000.00 0	1	54.000.00 0	1	70.000.00 0	1	70.000.00 0	2	100.000.0 00	Sekretaris
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatmny a penataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3	57.616.0 00	3	45.258.0 00	3	185.000. 000	3	235.000. 000	3	250.000. 000	3	200.000. 000	Kasubag Umpeg
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang	-	1	10.868.00 0	1	8.500.000	1	50.000.00 0	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	1	50.000.00 0	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Barang Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD (laporan)														
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	-	1	21.758.000	1	21.758.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	kasubag Umpeg
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	1	24.990.000	1	15.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Kasubag Umpeg
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya pengadministrasian	Jumlah Dokumen Administrasi	1	1	69.724.250	3	754.724.250	3	770.000.000	3	650.000.000	3	750.000.000	3	970.000.000	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepegawaian (Dokumen)														
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (orang)	80	20	69.724.25 0	40	254.724.2 50	40	150.000.0 00	40	150.000.0 00	60	250.000.0 00	60	250.000.0 00	Kasubag Umpeg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya (Paket)	-	-	-	-	-	2	220.000.0 00	-	-	-	-	2	220.000.0 00	Kasubag Umpeg
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	-	-	45	500.000.0 00	40	400.000.0 00	60	500.000.0 00	60	500.000.0 00	60	500.000.0 00	Kasubag Umpeg
Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perangkat Daerah															
Meningkatnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Layanan)	8	7	323.918.040	8	490.614.400	8	1.010.000.000	8	1.010.000.000	8	1.010.000.000	8	1.036.000.000	Kasubag Umpeg
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	31.873.600	1	31.873.600	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000	Kasubag Umpeg
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2	1	4.992.100	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Kasubag Umpeg
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	1	3.400.000	1	8.500.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	86.000.000	Kasubag Umpeg
Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	2	1	153.411.540	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Peraturan Perundang- undangan	Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dokumen)														
Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	-	-	-	1	100.000.0 00	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00	Kasubag Umpeg
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	1	38.087.00 0	1	38.087.00 0	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	Kasubag Umpeg
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	1	52.153.80 0	1	52.153.80 0	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	2	200.000.0 00	Kasubag Umpeg
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	1	40.000.00 0	1	40.000.00 0	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	16	30	78.835.2 00	50	400.000. 000	51	650.000. 000	41	300.000. 000	41	1.800.00 0.000	41	1.300.00 0.000	Kasubag Umpeg
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	-	-	-	-	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	Kasubag Umpeg
Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	15	10	78.835.20 0	30	250.000.0 00	20	100.000.0 00	20	100.000.0 00	20	100.000.0 00	25	200.000.0 00	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	-	-	-	15	150.000.0 00	20	100.000.0 00	20	100.000.0 00	20	100.000.0 00	40	500.000.0 00	Kasubag Umpeg
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan (unit)	-	-	-	-	-	10	350.000.0 00	0	-	4	1.500.000 .000	1	500.000.0 00	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya pengelolaan	Jumlah waktu penyediaan Jasa	8	3	442.716. 663	3	1.050.63 5.964	3	1.115.00 0.000	3	1.115.00 0.000	3	1.115.00 0.000	3	1.115.00 0.000	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bulan)														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	2	1	182.511.4 05	2	350.000.0 00	2	350.000.0 00	2	350.000.0 00	2	350.000.0 00	2	350.000.0 00	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	2	1	39.450.00 0	1	40.000.00 0	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	4	1	220.755.2 58	1	660.635.9 64	1	665.000.0 00	1	665.000.0 00	1	665.000.0 00	1	665.000.0 00	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Disediakan (laporan)														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	34	23	94.776.0 00	27	744.776. 000	24	772.036. 000	24	822.036. 000	24	822.036. 000	28	1.172.03 6.000	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	28	20	72.740.00 0	20	72.740.00 0	20	100.000.0 00	20	150.000.0 00	20	150.000.0 00	24	200.000.0 00	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya (Unit)														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	22.036.00 0	3	22.036.00 0	3	22.036.00 0	3	22.036.00 0	3	22.036.00 0	3	22.036.00 0	Kasubag Umpeg
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi (Unit)	3	-	-	3	650.000.0 00	1	650.000.0 00	1	650.000.0 00	1	650.000.0 00	1	950.000.0 00	Kasubag Umpeg

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggara an PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persen)	18,74	25,9 9	1.122.83 6.060	30	1.400.00 0.000	35	2.150.00 0.000	40	2.350.00 0.000	45	2.350.00 0.000	50	2.450.00 0.000	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberda yaa Perempua n, Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02.2.01 Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Penerapan ARG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender (OPD)	37	47	287.739. 200	58	250.000. 000	58	650.000. 000	58	850.000. 000	58	850.000. 000	58	950.000. 000	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberda yaa Perempua n, Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02.2.01.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	98.741.80 0	1	75.000.00 0	2	250.000.0 00	2	250.000.0 00	2	250.000.0 00	2	250.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.01.00 07 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	1	1	47.794.80 0	1	75.000.00 0	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.01.00 13 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraa n PUG kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	56	56	68.261.30 0	56	100.000.0 00	56	200.000.0 00	56	400.000.0 00	56	400.000.0 00	56	400.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02.2.01.00 14 Bimbingan Teknis Penyelenggaraa n PUG Kewenangan Kabupaten/Kot a	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (orang)	30	30	72.941.30 0	-	-	20	100.000.0 00	20	100.000.0 00	20	100.000.0 00	30	200.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kewenangan Kabupaten/ Kota															
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Organisasi)	28	28	499.860. 960	28	1.050.00 0.000	28	1.200.00 0.000	28	1.200.00 0.000	28	1.200.00 0.000	28	1.200.00 0.000	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberda yaa Perempua n, Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.02.00 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (lembaga)	28	28	426.422.9 60	28	950.000.0 00	28	950.000.0 00	28	950.000.0 00	28	950.000.0 00	28	950.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot a															Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.02.00 08 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot a	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	30	20	73.438.00 0	20	50.000.00 0	40	150.000.0 00	40	150.000.0 00	40	150.000.0 00	40	150.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02.2.02.00 09 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot a	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (orang)	-	-	-	20	50.000.00 0	40	100.000.0 00	40	100.000.0 00	40	100.000.0 00	40	100.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (Lembaga)	0	1	335.235.900	5	100.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	7	300.000.000	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	30	127.467.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)														Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	28	28	155.038.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	52.730.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.03.00 07 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	28	-	-	28	50.000.00 0	28	200.000.0 00	28	200.000.0 00	28	200.000.0 00	28	200.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
kewenangan Kabupaten/Kot a															n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.02.2.03.00 08 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	-	-	-	1	50.000.00 0	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender (Persen)	53,45	62,0 7	97.363.6 00	65,5 2	50.000.0 00	75,8 6	150.000. 000	82,7 6	250.000. 000	89,6 6	250.000. 000	100, 00	250.000. 000	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberda yaa Perempua n, Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta															
Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Data Data Terpilah Gender (perangkat daerah)	31	36	97.363.6 00	38	50.000.0 00	44	150.000. 000	48	250.000. 000	52	250.000. 000	58	250.000. 000	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberda yaa Perempua n, Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.05.2.01.00 03 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3	1	74.831.50 0	1	50.000.00 0	2	100.000.0 00	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.05.2.01.00 04 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	-	1	97.363.60 0	-	-	1	50.000.00 0	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	Kepala Bidang Pengarusu tamaan Gender, Pemberday aa Perempuan , Pengelolaa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															n Sistem Data Gender dan Anak
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen)	100	100	1.002.05 1.870	100	925.000. 000	100	1.850.00 0.000	100	1.850.00 0.000	100	1.850.00 0.000	100	1.850.00 0.000	Kepala Bidang Perlindun gan Perempua n dan Khusus Anak
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah pihak/lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO (lembaga)	20	11	289.539.570	11	125.000.000	11	700.000.000	11	700.000.000	11	700.000.000	11	700.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2	2	176.698.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)														
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (perangkat daerah)	5	11	112.841.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	1	75.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.03.2.01.00 06 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	-	-	-	10	50.000.00 0	30	300.000.0 00	30	300.000.0 00	30	300.000.0 00	30	300.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kewenangan Kabupaten/ Kota															
Meningkatnya Kualitas Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dilayani secara Komprehensif (Kasus)	50	50	386.806. 460	100	600.000. 000	100	850.000. 000	100	650.000. 000	100	650.000. 000	100	650.000. 000	Kepala Bidang Perlindungan Perempua n dan Khusus Anak
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (orang)	50	50	286.879.4 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (layanan)	6	10	99.927.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	50	50	-	50	500.000.000	70	700.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (orang)														Khusus Anak
2.08.03.2.02.00 09 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	50	50	-	50	100.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Daerah Kabupaten/ Kota															
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (lembaga)	10	10	325.705. 840	10	200.000. 000	15	300.000. 000	15	500.000. 000	15	500.000. 000	15	500.000. 000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	51.802.30 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	40	30	134.082.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15	50	49.992.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik (orang)														Khusus Anak
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	89.829.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non	10	10	-	10	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kewenangan Kabupaten/Kota	pemerintah) (Lembaga)														
2.08.03.2.03.00 08 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	40	30	-	30	100.000.000	30	100.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Perempuan Khusus Anak
2.08.03.2.03.00 09 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	1	1	-	1	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Perempuan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen)	100	100	1.831.969.929	100	1.200.000.000	100	1.800.000.000	100	2.550.000.000	100	2.700.000.000	100	3.650.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lingkup Daerah Kabupaten/ Ko ta															
Meningkatnya Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah SDM PPA yang meningkat Kapasitasnya dalam Memberikan Pelayanan Pengaduan Korban Kekerasan (orang)	22	50	379.925. 800	20	150.000. 000	50	200.000. 000	50	600.000. 000	50	600.000. 000	50	600.000. 000	Kepala Bidang Perlindun gan Perempua n dan Khusus Anak
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (orang)	22	50	148.550.6 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.07.2.01.00 06 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kot a	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (dokumen)	2	2	231.375.2 00	2	100.000.0 00	2	100.000.0 00	6	300.000.0 00	6	300.000.0 00	6	300.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.01.00 07 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	-	-	1	50.000.00 0	2	100.000.0 00	6	300.000.0 00	6	300.000.0 00	6	300.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilayani secara Komprehensif (orang)	150	100	938.139.899	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.300.000.000	100	1.350.000.000	100	1.950.000.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan	100	100	813.462.699	100	700.000.000	100	700.000.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	250	1.500.000.000	Kepala Bidang Perlindung

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kot a	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)														an Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.02.00 11 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	-	-	50	100.000.0 00	50	100.000.0 00	50	100.000.0 00	50	100.000.0 00	50	100.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.02.00 13 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	50	50	124.677.2 00	100	100.000.0 00	150	200.000.0 00	150	200.000.0 00	200	250.000.0 00	250	350.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															Khusus Anak
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Penguatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk (lembaga)	-	5	513.904. 230	10	150.000. 000	10	600.000. 000	10	650.000. 000	20	750.000. 000	25	1.100.00 0.000	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus															Khusus Anak
2.08.07.2.03.00 07 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kot a	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	-	2	106.258.030	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Kepala Bidang Perlindungan an Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.03.00 09 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang	-	1	111.399.380	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kepala Bidang Perlindungan an Perempuan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)															Khusus Anak
2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non a	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non a	-	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000	25	300.000.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pemerintah) (Lembaga)														
2.08.07.2.03.00 12 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	-	-	-	1	50.000.00 0	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	6	300.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak
2.08.07.2.03.00 13 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	-	-	-	-	-	30	150.000.0 00	50	200.000.0 00	50	200.000.0 00	60	300.000.0 00	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot ai	Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (orang)														Khusus Anak
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kot a	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (dokumen)	2	3	174.794.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (orang)	50	50	121.452.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perlindung an Perempuan dan Khusus Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kot a															
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (Nilai)	690	690	1.872.32 4.420	710	275.000. 000	750	1.000.00 0.000	800	1.150.00 0.000	850	1.550.00 0.000	880	2.150.00 0.000	Kepala Bidang Peningkat an Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak
2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA pada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko ta															
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang Ramah Anak	Jumlah Lembaga Ramah Anak (Lembaga)	10	10	137.779. 600	10	125.000. 000	12	700.000. 000	15	700.000. 000	17	800.000. 000	20	1.150.00 0.000	Kepala Bidang Peningkat an Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak
2.08.06.2.01.00 03 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan	10	10	86.203.60 0	-	-	12	150.000.0 00	15	150.000.0 00	17	200.000.0 00	20	300.000.0 00	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)														dan Pemenuha n Hak Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	51.576.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.06.2.01.00 04 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	-	-	-	10	75.000.00 0	30	250.000.0 00	30	250.000.0 00	30	250.000.0 00	30	250.000.0 00	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak
2.08.06.2.01.00 05 Pendampingan Penyelenggaraa n Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	-	-	-	1	50.000.00 0	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	3	150.000.0 00	6	300.000.0 00	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)														n Hak Anak
2.08.06.2.01.00 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	10	-	-	-	-	12	150.000.0 00	15	150.000.0 00	17	200.000.0 00	20	300.000.0 00	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Lembaga)														
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA (lembaga)	10	10	1.734.544.820	10	150.000.000	12	300.000.000	15	450.000.000	17	750.000.000	20	1.000.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kualitas Hidup Anak															Pemenuhan Hak Anak
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	1.504.680.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	55.548.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4	67.520.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1	7	106.795.3 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Dokumen)														
2.08.06.2.02.00 05 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (orang)	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (orang)	-	-	-	20	50.000.000	20	100.000.000	30	150.000.000	50	250.000.000	60	400.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.06.2.02.00 06 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	-	-	-	1	50.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	5	250.000.000	6	300.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuha

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (dokumen)														n Hak Anak
2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	-	-	10	50.000.000	12	100.000.000	15	150.000.000	17	250.000.000	20	300.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA Sesuai Standar (Persen)	15	20	603.002.940	25	300.000.000	30	925.000.000	35	1.000.000.000	40	1.200.000.000	45	2.000.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Kapasitas Pusat Pembelajaran Keluarga	Jumlah Puspaga yang dibina (Lembaga)	10	10	300.370.000	10	150.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	20	400.000.000	25	500.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	56	56	95.742.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)														
2.08.04.2.01.00 04 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000	25	300.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.04.2.02.00 04 monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Peningkatan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	-	-	-	10	50.000.000	56	200.000.000	56	200.000.000	56	200.000.000	56	200.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)														Pemenuha n Hak Anak
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	4	110.749.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	3	3	93.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)														dan Pemenuha n Hak Anak
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Ko ta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kapasitas Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan (Lembaga)	10	10	302.632.940	10	-	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	20	900.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.04.2.02.00 06 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2	2	82.826.340	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	4	300.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.04.2.02.00 07 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	5	5	166.462.6 00	-	-	5	150.000.0 00	5	150.000.0 00	5	150.000.0 00	10	300.000.0 00	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak
2.08.04.2.02.00 08 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	53.344.00 0	-	-	5	150.000.0 00	5	150.000.0 00	5	150.000.0 00	10	300.000.0 00	Kepala Bidang Peningkata n Kualitas Keluarga dan Pemenuha n Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota															
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG	3	-	-	3	150.000. 000	3	225.000. 000	3	300.000. 000	3	400.000. 000	3	600.000. 000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KG dan Hak Anak	dan Hak Anak (layanan)														dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.04.2.03.00 02 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (orang)	-	-	-	20	75.000.000	25	100.000.000	30	150.000.000	35	200.000.000	40	300.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak
2.08.04.2.03.00 04 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (orang)	-	-	-	20	75.000.000	25	125.000.000	30	150.000.000	35	200.000.000	40	300.000.000	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				14.359.7 28.818		15.094.3 73.547		20.122.2 44.764		21.625.0 08.551		24.686.0 31.650		28.443.5 98.851	

4.4 Data Statistik Daerah Dalam Sub Kegiatan

Tabael 4.3
DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH DALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2020 - 2029 KAB. KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020 - 2029

N O	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)				
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUA N	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	202 2	202 3	202 4
							TO	T1	T2	T3	T4	T5					
1	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	0	1	4	4	4	4	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisa si	0	0	4
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat serta Kab/Kota	Lembag a	0	10	30	30	30	30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Dokume n	0	1	1

			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban kekerasan	orang			
				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban kekerasan	orang			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	lembaga	10	10	15	15	15	15	Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	organisasi	0	0	5
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	30	30	30	60	60	60	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisasi	0	0	30
				Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	1	3	3	3	3	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisasi	0	0	5

		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	2	0	2	2	2	4	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	organisasi	3	3	5
				peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	lembaga	5	0	5	5	5	10	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	organisasi	5	5	7
				Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	5	0	5	5	5	10	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	organisasi	3	3	5
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	lembaga	0	10	10	10	20	25	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisasi	3	10	11

				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Dokumen	0	10	56	56	56	56	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisasi	0	20	56
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	orang	0	20	25	30	35	40	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	orang	0	20	30
				ayanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	orang	0	20	25	30	35	40	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	orang	0	20	25
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	2	3	3	3	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	3

				Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam	Lembaga	0	1	1	2	2	2	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0	0	3
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	0	12	15	17	20	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	11	12
				Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	30	30	30	30	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	35
				Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	1	3	3	3	6	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	3	5

				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	12	15	17	20	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	15
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	orang	0	20	20	3	50	60	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	0	20	25
				penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	2	3	5	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	0	3	5
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	10	12	15	17	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	0	10	12
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	100	100	100	100	100	100	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	orang	131	159	147

				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	0	50	50	50	50	50	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	orang	0	0	0
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	50	50	100	150	200	250	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	orang	131	159	147
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2	2	2	6	6	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	kegiatan	0	1	2	6	6	6	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	1
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	2	0	2	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	1	1	1

				koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	0	1	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	1	1	1
				Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Dokumen	0	10	10	10	20	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	1	1	1
				penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	3	3	3	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	1	1	1
				Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	orang	0	0	30	50	50	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	0	0	0

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	2	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen	1	1	1
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	1	1	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen	1	1	1
		Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	56	56	56	56	56	56	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	56	56	56
		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	orang	30	0	20	20	20	30	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	30	0	20
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	28	28	28	28	28	28	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	28	28	28

				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	orang	20	20	40	40	40	40	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	20	20	40
				Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	orang	0	20	40	40	40	40	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	20	40	40
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	28	28	28	28	28	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisasi	28	28	28
				penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	0	1	2	2	2	2	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	organisasi	0	0	3

4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memperhatikan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD, bahwa Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tidak termasuk Organisasi Perangkat daerah yang mengampu program prioritas tersebut, akan tetapi terdapat beberapa program kerja yang mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang menjadi program Nasional terkait isu perempuan dan anak, pembangunan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara seperti table dibawah :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, SubKegiatan : Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan : Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Kementrian PPPA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Program Kementrian PPPA
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan : 1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota, 2. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Program Kementrian PPPA
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan : Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Kementrian PPPA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan : penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan : layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Program Kementrian PPPA

Sumber : hasil proyeksi 2025

4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Penetapan IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	Satuan	Periode Tahun Sebelumnya				BASLINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Ket
			Baseline	Target Tahun Terakhir	Capaian Tahun Terakhir	Persentase Capaian Kinerja (%)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IKD)	Indeks	0,44	0,43	0,44	102,09	0,44	0,43	0,42	0,39	0,36	0,33	0,31	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Indeks	81,20	81,00	81,20	100,25	81,20	81,50	82,10	82,80	83,20	84,25	85,10	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (IKU)	Indeks	62,09	62,00	62,09	100,15	62,09	62,50	62,90	63,00	63,05	63,10	63,20	

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK DP3A untuk pembangunan jangka menengah dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Tren historis yang diperlihatkan oleh kedua IKU ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan ke depan. Kenaikan Indeks Ketimpangan Gender yang stabil memberikan optimisme bahwa target yang lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang dapat dicapai, namun juga menantang pengelola program untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang sudah tinggi. Capaian awal Indeks Pembangunan Gender yang kuat di tahun 2024 menjadi titik acuan penting untuk penetapan target tahunan yang ambisius, mendorong upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Dalam periode perencanaan yang tercakup dalam Renstra DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 hingga 2029, kinerja penyelenggaraan bidang urusan menunjukkan upaya berkelanjutan dan komprehensif dalam meningkatkan inklusivitas berbagai aspek pembangunan sosial di daerah serta perlindungan anak. Sebagai fondasi kebijakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terdapat sejumlah indikator kunci yang dijadikan tolak ukur kemajuan program-program yang relevan.

Dengan demikian, kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan selama periode Renstra ini menggambarkan sebuah proses yang dinamis dan adaptif

terhadap kebutuhan serta tantangan yang berkembang. Melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang disiplin, diharapkan setiap indikator tidak hanya mencapai target yang telah ditetapkan tetapi juga memberikan dampak nyata dalam peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Renstra DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun secara optimal dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan semangat kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, Renstra ini diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Renstra DP3A Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perencanaan yang matang ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Implementasi Renstra ini diharapkan menjadi komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, demi mewujudkan pembangunan yang sejahtera, inklusif, dan berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra DP3A Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a) Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
- b) Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- c) Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
- d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra, maka perlu dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra secara berkala;

Adapun Pengendalian dan Evaluasi yang perlu dilakukan oleh DP3A adalah sebagai berikut :

- a) Memastikan Renstra menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD tahunan;
- b) Mengukur tingkat keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indikator sasaran kinerja yang ditetapkan;
- c) Perangkat daerah akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi PUG: antara lain pelaporan tahunan data terpilah, penilaian PPE, dan pelibatan forum perempuan/difabel;
- d) Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi hasil Renstra PD menggunakan evaluasi hasil Renja PD setiap tahun dan
- e) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan menjadi indikator keberhasilan dalam memenuhi target program, kegiatan dan subkegiatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dukungan kuat terhadap komitmen pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah sangat krusial dalam menggerakkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Renstra yang fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal maka keberhasilannya akan lebih besar. Dengan demikian, Renstra ini berperan sebagai pijakan strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kutai Kartanegara, Oktober 2025



LAMPIRAN

I. **GAP (Gender Analysis Pathway) dan Penerapannya dalam Arah Kebijakan Renstra DP3A 2025–2029**

Tabel I. Empat Langkah GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan Penerapannya dalam Arah Kebijakan Renstra DP3A 2025–2029

Langkah GAP	Uraian Langkah	Implementasi dalam Arah Kebijakan DP3A 2025–2029
1. Identifikasi Isu Gender (Situasi Awal)	Mengidentifikasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan pada bidang prioritas DP3A.	◆ Prioritas Lokus PUG — Menentukan wilayah, sektor, atau kelompok sasaran yang menunjukkan kesenjangan gender tinggi (misalnya partisipasi ekonomi perempuan rendah, kasus kekerasan tinggi, atau rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga publik). ◆ Meningkatkan evidence-based policy melalui kajian situasi gender di daerah.
2. Analisis Faktor Penyebab Kesenjangan	Menganalisis akar penyebab kesenjangan gender yang telah diidentifikasi, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, norma sosial, maupun kapasitas SDM.	◆ Penguatan Data Terpilah dan Sistem Informasi Gender Anak (SIGA) — Membangun data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, wilayah, dan faktor sosial ekonomi untuk mengungkap akar masalah secara objektif. ◆ Memperkuat kapasitas aparatur dalam melakukan

Langkah GAP	Uraian Langkah	Implementasi dalam Arah Kebijakan DP3A 2025–2029
		analisis gender agar faktor penyebab terpetakan dengan jelas.
3. Formulasi Strategi PUG (Rencana Aksi)	Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan gender berdasarkan hasil analisis.	◆ Peningkatan Investasi PUG — Mengintegrasikan anggaran responsif gender (ARG) dalam program prioritas daerah dan mendorong peningkatan alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender. ◆ Mendorong pembentukan Gender Focal Point (GFP) di setiap perangkat daerah.
4. Rencana Tindak dan Kolaborasi Implementasi	Menetapkan mekanisme pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi program PUG.	◆ Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah — Membangun sinergi antara DP3A, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program PUG dan perlindungan anak. ◆ Penguatan forum koordinasi PUG serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi responsif gender (MeRG) secara berkala untuk memastikan capaian sasaran Renstra.

II. DEFINISI OPERASIONAL DAN META DATA INDIKATOR

Tabel II. Daftar Indikator

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Ukuran ketimpangan gender dalam pembangunan manusia dengan menggunakan 3 dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indikator masing-masing dimensi: 1. Kesehatan Reproduksi: - Proporsi perempuan 15-49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) Definisi operasional: Proporsi total persalinan (perempuan usia 15-49 tahun) yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, klinik) terhadap total persalinan. - Proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20	Badan Pusat Statistik	<i>*Data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik</i>

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
			tahun Definisi operasional: Persentase perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun terhadap total perempuan usia 15-49 tahun yang pernah kawin. 2. Pemberdayaan - Persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA Definisi Operasional: Proporsi perempuan usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas (SMA) terhadap total penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas. - Persentase anggota legislatif perempuan Definisi Operasional: Persentase kursi yang diduduki oleh perempuan di lembaga legislatif (DPR/DPRD) terhadap total kursi di parlemen. 3. Pasar Tenaga Kerja		

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
			-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Definisi Operasional: Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap total penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas.		
2	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam aktivitas pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG adalah rasio (perbandingan) antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki.	Badan Pusat Statistik	Nilai Indeks Pembangunan Manusia untuk Perempuan DIBAGI nilai Indeks Pembangunan Manusia untuk Laki-laki DIKALI 100 PERSEN <i>*Data diperoleh</i>

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
					<i>melalui publikasi Badan Pusat Statistik</i>
	Meningkatnya Perlindungan Anak dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberda- yaan Perempua- n dan Perlindun- gan Anak (KemenPP- PA)	<i>*Data diperoleh melalui publikasi KEMENPPPA pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)</i>

NO	KINERJA TUJUAN/SASAR AN/PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
3	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi total anggaran belanja yang dialokasikan untuk kegiatan atau program yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai responsif gender.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Total Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan responsif Gender DIBAGI Total Anggaran Belanja SKPD DIKALI 100 PERSEN
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Profil Gender dan Anak	Proporsi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/kota yang telah berhasil menyusun, menyajikan, dan memanfaatkan Data Terpilah Gender dan Anak yang komprehensif dan berkelanjutan di sektornya masing-masing.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang setelah diverifikasi oleh Tim Pengarusutamaan Gender

NO	KINERJA TUJUAN/SASAR AN/PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
		Tingkat Kabupaten			(PUG) atau Instansi DP3A setempat, dinyatakan memenuhi tiga kriteria utama (Ketersediaan, Kualitas, dan Pemanfaatan) atas Data Profil Gender dan Anak DIBAGI jumlah seluruh Perangkat Daerah (SKPD) yang secara regulasi atau kebijakan lokal

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
					diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Data Profil Gender dan Anak DIKALI 100 PERSEN
5	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Proporsi korban perempuan yang telah teridentifikasi dan tercatat, yang menerima paket layanan dukungan terpadu (multidimensi) dari lembaga layanan resmi pemerintah atau lembaga mitra pemerintah, terhadap total seluruh korban perempuan yang teridentifikasi dalam periode waktu tertentu.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban yang Menerima Layanan Komprehensif DIBAGI Total Jumlah Perempuan Korban yang

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
					Teridentifikasi DIKALI 100 PERSEN
6	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	proporsi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang telah teridentifikasi dan tercatat, yang menerima paket layanan dukungan terpadu (multidimensi) yang relevan dengan kebutuhan spesifik mereka, terhadap total seluruh AMPK yang teridentifikasi dalam periode waktu tertentu.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang Menerima Layanan Komprehensif DIBAGI total Jumlah AMPK yang Teridentifikasi DIKALI 100 PERSEN
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak AnakMeningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Hasil evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui 24 indikator yang turun dari kelima klaster substantif hak anak dan kelembagaan serta dua komponen tambahan yaitu	Kementerian an Pemberdayaan Perempuan	<i>*Data diperoleh melalui hasil evaluasi oleh KEMENPPPA</i>

NO	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
			untuk melihat penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan.	n dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)	
8	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA Sesuai Standar	Proporsi dari total keluarga atau individu yang menerima layanan konsultasi/konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang proses layanannya telah memenuhi Standar Pelayanan PUSPAGA yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, mengacu pada pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Keluarga yang Layanan Konselingnya Memenuhi Standar DIBAGI Total Jumlah Kunjungan Keluarga yang Mendapatkan Layanan Konseling/Kons

NO	KINERJA TUJUAN/SASAR AN/PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI KONSEPTUAL	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN
					ultasi DIKALI 100 PERSEN

ESS EON II ESS E LON III KOORDINATOR

